

BAB V

KESIMPULAN

Alam perpolitikan di Jepang kembali dihadapkan pada fenomena percepatan pemilihan umum. Percepatan waktu ini terjadi karena langkah berani yang ditempuh oleh Perdana Menteri Junichiro Koizumi yang membubarkan Majelis Rendah (*House of Representatives*) setelah usulannya untuk mereformasi Perusahaan Pos Jepang gagal dalam meraih dukungan suara dalam pemungutan suara di Majelis Tinggi (*House of Councilors*). Kekalahan tersebut juga tidak lepas dari pembelotan yang dilakukan oleh 37 orang anggota parlemen dari kubu partai yang dipimpinnya sendiri (LDP).

Setelah Perdana Menteri Koizumi membubarkan Majelis rendah Jepang pada tanggal 8 Agustus 2005, ia lalu memerintahkan pemilu parlemen pada tanggal 11 September 2005. PM Koizumi menghendaki pemilu parlemen untuk melihat apakah rakyat Jepang mendukung atau malah menolak program reformasi yang telah diusulkannya.

Junichiro Koizumi semenjak terjun ke dunia politik telah dikenal sebagai seorang tokoh yang kontroversial. Ia sangat mendukung reformasi dan cita-citanya adalah mereformasi pemerintahan Jepang. Ketika pertama kali mencoba bertarung menjadi Perdana Menteri di tahun 1995 (namun gagal), Koizumi telah berusaha

mendesak swastanisasi perusahaan pos, menjalankan deregulasi, dan merampingkan birokrasi pemerintahan. Begitu pula saat menjadi Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan di bawah Perdana Menteri Ryutaro Hashimoto, Koizumi pernah mengancam akan mundur jika privatisasi sistem tabungan pos tak dijalankan.

Setelah Koizumi terpilih menjadi Perdana Menteri pada pemilu bulan April tahun 2001, isu privatisasi Perusahaan Pos Jepang semakin mengemuka. Karena Koizumi tidak pernah bisa mengerti mengapa pemerintah harus menggaji lebih dari 260.000 karyawan pos di Jepang yang beroperasi dengan biaya negara. Biaya pengelolaan kantor pos yang menyebar di seluruh wilayah Jepang diperoleh dari pajak rakyat dengan jumlah yang sangat besar (menguasai 3,2 triliun dollar AS dana dari masyarakat, yang berbentuk tabungan dan asuransi). Sementara perolehan keuntungan dari kantor pos Jepang tidak seimbang dengan pengeluaran yang ditanggung oleh pemerintah, untuk itu harus di reformasi.

Data pasca pemilu 2003 menunjukkan LDP menguasai 237 kursi ditambah dengan mitra koalisi dari partai New Komeito sebanyak 34 kursi, sehingga kekuatan LDP sebanyak 271 kursi (lihat lampiran 3). Dengan kekuatan kursi di Majelis Rendah sebanyak itu, sebenarnya Koizumi bisa dengan aman mempertahankan kekuasaannya sampai pemilu yang akan datang pada tahun 2007. Akan tetapi demi ide swastanisasi perusahaan pos Jepang yang merupakan salah satu gagasan reformasinya terganjal oleh Majelis tinggi, Koizumi pun merasa tertantang.

Koizumi juga harus menghadapi perpecahan dalam tubuh partainya. Sebanyak 37 orang anggota parlemen dari LDP yang menolak swastanisasi perusahaan pos Jepang dilarang mencalonkan diri di bawah bendera LDP. Pilihannya adalah membuat partai baru, menjadi calon independen, atau malah tidak mencalonkan diri sama sekali. Oleh karena itu, setidaknya terdapat dua partai pecahan LDP yang telah berdiri dan siap mengikuti pemilu 2005, yaitu Partai Rakyat Baru (PNP) pimpinan Shizuka Kamei dan Partai Jepang Baru (NPN) pimpinan Yasuo Tanaka. Dan anggota-anggota partai yang memberontak dan membentuk partai-partai baru tersebut dikawatirkan akan menarik banyak pemilih.

Pemilu September 2005 dapat dikatakan sangat beresiko sepanjang sejarah perpolitikan di Jepang, terutama bagi karir Junichiro Koizumi sebagai Perdana Menteri. Untuk mencegah agar para pemberontak tidak kembali duduk dalam parlemen, maka Koizumi mengatur siasat dengan jalan berkoalisi dengan para tokoh oposisi terkemuka yang bisa mengalahkan partai-partai pemberontak seperti PNP dan NPN. Menghadapi para petarung politik lama tersebut, Koizumi menampilkan wajah-wajah muda dan wanita guna "menghancurkan LDP lama dan menegakkan LDP baru".

Lawan terberat Koizumi lainnya adalah Partai Demokrat Jepang (DPJ) pimpinan Katsuya Okada yang telah menguasai sebanyak 177 kursi di Majelis Rendah Jepang hasil pemilu 2003. DPJ yang turut menentang swastanisasi

perusahaan pos Jepang berusaha menjatuhkan Koizumi dengan mengusung usulan perbaikan hubungan bilateral dengan China dan Korea Selatan yang terus memburuk sejak kepemimpinan PM Koizumi tahun 2001 akibat kunjungan rutin Koizumi ke kuil perang Yasukuni, yang menjadi sejarah bagi agresi militer Jepang pada saat Perang Dunia II.

Namun pemilu kali ini dapat dikatakan pemilu yang paling dinamis dalam sejarah perpolitikan Jepang, karena munculnya dua kekuatan politik yang sama kuatnya yaitu LDP dan DPJ. Kampanye pemilu yang dimulai tanggal 30 Agustus 2005 digunakan sebaik mungkin untuk mempengaruhi opini publik. Masyarakat juga nampak antusias dalam menghadiri kampanye, para kandidat tampil di televisi untuk berdebat mengenai kebijakan partai, dan menggunakan media masing-masing. Pemilu Majelis Rendah yang dilaksanakan tanggal 11 September 2005 ini memperebutkan 480 kursi.

Untuk memperkuat posisinya, LDP (wajah baru) kembali menggandeng partai New Komeito sebagai mitra koalisi. Popularitas Koizumi dan LDP pun semakin meningkat sejak hari pertama kampanye dimulai. Koizumi juga memanfaatkan media massa dengan sebaik mungkin dalam kampanyenya. Bila hasil pemilu 2003 LDP mempunyai kekuatan sebanyak 271 kursi (hasil koalisi), maka setelah pemilu 2005 perolehan suara meningkat menjadi 327 kursi. Ini menandai babak baru politik di negeri Sakura.

Dengan kemenangan mutlak bagi kubu Koizumi, secara otomatis usulan untuk menggulirkan Undang-undang swastanisasi Pos Jepang akan berjalan mulus. Sedangkan disisi lain, pukulan telak harus dirasakan oleh partai oposisi utama Jepang, DPJ. Setelah kekalahannya pada pemilu September 2005, secara resmi pimpinan DPJ Katsuya Okada mengumumkan pengunduran dirinya sebagai ketua partai.

Pelajaran politik yang menarik yang dapat kita petik adalah sikap gigih dan berani mengambil resiko telah ditunjukkan oleh Koizumi. Meskipun sebenarnya ia bisa menikmati kekuasaan sampai tahun 2007, akan tetapi demi sebuah ide dan gagasan besar yang telah menjadi cita-cita politiknya, ia berani membubarkan parlemen dan menyerukan pemilu yang dipercepat dari jadwal semula dengan resiko kehilangan kekuasaan.

Dalam kasus politik di Jepang tahun 2005, sikap agresif justru ditunjukkan oleh kaum eksekutif. Koizumi tidak sedang menghadapi masalah krisis kepercayaan. Parlemen hanya tidak ingin Koizumi melanjutkan ide reformasi perusahaan pos.